



Ekonomi Hijau dan Pemulihan Ekonomi : Strategi, Implementasi, dan Hambatan Global

Muh. Adzam

STIE “YKP” Yogyakarta

Jalan Godean KM 3 Tambak, Ngestiharjo, Kasihan, DI Yogyakarta

Email : mhmmdadzam@stieykp.ac.id

Abstract. *The concept of the green economy serves as a global strategy to address social, economic, and environmental crises. It involves the development, implementation, and evaluation of various approaches to promote sustainability, reduce poverty, and support vulnerable social groups. This study explores the role of the green economy in economic recovery and multilateral issues using a descriptive literature-based method. The findings suggest that implementing a green economy can drive national recovery and address global challenges. Policymaker collaboration and public support are crucial for ensuring a sustainable and environmentally healthy ecosystem for present and future generations.*

Keywords: *Green Economy, Economic Recovery, Multilateral*

Abstrak. Konsep ekonomi hijau berfungsi sebagai strategi global untuk mengatasi krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini melibatkan pengembangan, penerapan, dan evaluasi berbagai pendekatan untuk mendorong keberlanjutan, mengurangi kemiskinan, dan mendukung kelompok sosial yang rentan. Studi ini mengeksplorasi peran ekonomi hijau dalam pemulihan ekonomi dan berbagai isu multilateral menggunakan metode deskriptif berbasis literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau dapat mendorong pemulihan nasional dan mengatasi berbagai tantangan global. Kolaborasi pembuat kebijakan dan dukungan publik sangat penting untuk memastikan ekosistem yang berkelanjutan dan sehat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Pemulihan Ekonomi, Multilateral

1. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2020 telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama di sektor ekonomi dan kesehatan (Clemente-Suárez et al., 2021). Kebijakan pembatasan mobilitas serta langkah kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk menahan penyebaran virus memicu resesi ekonomi global terbesar dalam lebih dari satu abad (Gössling et al., 2021). Kontraksi ekonomi akibat menurunnya permintaan konsumen dirasakan hampir di seluruh negara, dengan dampak yang lebih berat pada negara berkembang yang rentan terhadap risiko utang dan ketidakpastian ekonomi (Anwar, 2022). Dalam menghadapi tantangan ini, banyak negara mulai menerapkan strategi ekonomi hijau guna menciptakan pemulihan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dalam situasi krisis tersebut, pemerintah di berbagai negara bertindak cepat dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter guna mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi (Hanifa & Fisabilillah, 2021). Pembangunan ekonomi sendiri menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, pemulihan ini tidak terjadi secara merata, negara maju mulai

bangkit pada 2021, sementara negara berkembang masih menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk dalam mendukung kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan usaha kecil. Dalam konteks ini, Indonesia menilai pentingnya mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Di Indonesia, penerapan ekonomi hijau menjadi fokus utama dalam kebijakan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kebijakan seperti *Low Carbon Development Initiative* (LCDI) telah diperkenalkan untuk mengurangi emisi karbon sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) sebagai bagian dari komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, implementasi ekonomi hijau menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan, regulasi, serta koordinasi antara sektor publik dan swasta dalam memastikan transisi energi yang berkelanjutan.

Ekonomi hijau menghadirkan strategi yang menggabungkan tiga aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan pelestarian lingkungan. (UN Environment Programme, 2024). Konsep ini bertujuan menciptakan sistem yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial dengan investasi yang mendukung pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Kebijakan ekonomi hijau tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, pendidikan berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan (Anwar, 2022).

Dengan meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, serta gangguan rantai pasokan, pendekatan ekonomi hijau memberikan peluang reformasi yang signifikan. Prinsip keberlanjutan yang diusungnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keadilan antargenerasi, dan perlindungan alam sebagai dasar untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan tangguh (Anwar, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi manfaat ekonomi hijau dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi berbagai tantangan global yang ada.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau, atau *green economy*, merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko lingkungan serta mencegah kelangkaan sumber daya alam. (Supriatna, 2021).

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Keberlanjutan dalam ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan tanpa menghabiskan sumber daya yang menjadi modal ekonomi, sementara keberlanjutan lingkungan berfokus pada menjaga stabilitas iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Untuk mengintegrasikan ketiga aspek ini, konsep ekonomi hijau hadir sebagai solusi strategis. Ekonomi hijau mengacu pada sistem yang rendah emisi karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial, di mana investasi dari sektor publik maupun swasta berperan dalam mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, serta menjaga kelestarian biodiversitas (UN Environment Programme, 2024).

Ekonomi hijau bertujuan menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan kelestarian lingkungan (Windi Yuni Andini et al., 2024). Konsep ini mengutamakan dialog antara pembuat kebijakan, ekonom, dan masyarakat untuk membandingkan jalur pembangunan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi secara seimbang. Kebijakan ekonomi hijau berfokus pada pengelolaan limbah, pengurangan eksploitasi sumber daya, serta pengembangan pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan ramah lingkungan.

Konsep ini juga menawarkan visi pembangunan berbasis prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Beberapa prinsip utama ekonomi hijau mencakup kesejahteraan masyarakat, keadilan antargenerasi, efisiensi konsumsi dan produksi, perlindungan alam, serta tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip ini memprioritaskan investasi berkelanjutan, penguatan sistem pendidikan, dan pengambilan keputusan yang inklusif untuk mendorong inovasi dan menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Ekonomi hijau pada akhirnya memberikan peluang reformasi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial.

Sebagai contoh, di Indonesia, kebijakan Program Kampung Iklim telah diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bagaimana ekonomi hijau dapat diterapkan di tingkat mikro sekaligus mendukung kebijakan makro.

Permasalahan Ekonomi dan Multilateral

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar pertama bagi sistem keuangan global sejak reformasi keuangan G20 setelah krisis 2008 (Anwar, 2022). Berbeda dengan krisis sebelumnya, kali ini penyebab utamanya berasal dari faktor eksternal, yaitu kebijakan pembatasan pandemi yang secara tiba-tiba menghentikan aktivitas ekonomi. Untuk merespons situasi ini, berbagai kebijakan luar biasa diterapkan guna menstabilkan pasar dan memastikan

kelancaran pembiayaan. Meskipun sistem keuangan saat ini lebih kuat dibandingkan pada krisis 2008, pandemi tetap mengungkap kelemahan, terutama dalam hal prosiklikalitas, yang berpotensi memperburuk dampak guncangan ekonomi.

Selain itu, perang Rusia-Ukraina menambah tekanan global melalui gangguan perdagangan, investasi, dan rantai pasokan. Perang ini memengaruhi pasar pangan dan energi, meningkatkan harga gandum, jagung, serta gas alam. Konflik juga merusak rantai pasokan global, menghambat produksi, dan menimbulkan risiko terhadap stabilitas perdagangan internasional. Beberapa pihak khawatir bahwa konflik ini dapat memperburuk fragmentasi ekonomi global dan menghambat pemulihan jangka panjang.

Indikator Ekonomi Hijau

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator makroekonomi penting yang memengaruhi kesejahteraan Masyarakat (Sultan et al., 2023). Van den Berg, (2016) dalam studinya menjelaskan pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan barang dan jasa, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup. Agusalm (2016), menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bertujuan meningkatkan pendapatan nasional demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan yang dianalisis secara sistematis guna memperoleh perspektif baru. Rangkaian studi mencakup kegiatan pengumpulan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari berbagai sumber Pustaka. Studi literatur bertujuan memperoleh dasar teori dari buku, penelitian sebelumnya, catatan, dan laporan yang relevan. Data yang digunakan bersifat sekunder, berasal dari jurnal kredibel, artikel ilmiah, dan dokumen institusi (Zed, 2008).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Hijau Sebagai Solusi Krisis

Dalam *Blueprint for a Green Economy* (Pearce et al., 1989), ekonomi hijau didefinisikan sebagai sistem yang mendukung kesejahteraan manusia jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Implementasi konsep ini telah berhasil di beberapa negara seperti Jerman dan Korea Selatan, yang mengalokasikan dana stimulus besar untuk proyek energi terbarukan pasca-pandemi.

Berdasarkan UN Environment Programme (2025), Ekonomi hijau menekankan pada pembangunan yang rendah emisi karbon, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Pendekatan utamanya mencakup penurunan emisi karbon,

peningkatan efisiensi energi, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Agar dapat berjalan dengan efektif, diperlukan dukungan investasi dari sektor publik dan swasta, reformasi kebijakan, serta penyesuaian regulasi yang mendukung keberlanjutan.

Ekonomi hijau juga menargetkan pengentasan kemiskinan dengan menjaga kualitas hidup tanpa merusak sumber daya alam. Namun, implementasi konsep ini perlu mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan dan risiko lingkungan, serta fokus pada delapan sektor ekonomi utama, seperti energi terbarukan, investasi modal alam, dan peningkatan kesetaraan sosial. Menurut dokumen UNEP berjudul "*Menuju Ekonomi Hijau*," konsep ini dapat dipahami melalui berbagai aspek seperti energi, transportasi, dan keberlanjutan perkotaan. Ringkasan dari sektor-sektor tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sektor-sektor Utama Ekonomi untuk Mencapai Transisi ke Ekonomi Hijau

Sektor	Deskripsi
Pertanian	Mengoptimalkan pengelolaan pupuk, air, benih, serta menerapkan manajemen terpadu dalam penggunaan pestisida dan nutrisi.
Kehutanan	Mengurangi penggundulan hutan, meningkatkan program reboisasi, memastikan sertifikasi produk kehutanan, serta memberikan kompensasi untuk jasa lingkungan.
Sumber air	Mengoptimalkan penggunaan air tanah dan air permukaan secara efisien untuk memastikan kualitas hidup yang layak bagi masyarakat.
Penangkapan ikan	Meningkatkan praktik perikanan berkelanjutan melalui inovasi produksi dan dukungan pembiayaan guna mengurangi eksploitasi ikan secara berlebihan di seluruh dunia.
Ekowisata	Mendorong pengembangan ekonomi dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan kelompok rentan dalam rantai industri pariwisata.
Energi terbarukan	Meningkatkan diversifikasi sumber energi terbarukan dengan berinvestasi dalam biofuel, panel surya fotovoltaik, dan teknologi tenaga angin.
Transportasi	Mengalihkan penggunaan transportasi pribadi ke transportasi umum untuk meningkatkan efisiensi mobilitas dan pemanfaatan ruang secara optimal.
Industri manufaktur	Memperkuat sektor manufaktur dengan memperpanjang masa pakai produk melalui desain ulang dan proses daur ulang, serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan energi.

Sumber : Anwar (2022)

Sektor-sektor utama berfokus pada pengurangan emisi karbon, pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, serta kesejahteraan sosial yang inklusif. Untuk mengurangi dampak lingkungan, sektor ekonomi yang memiliki pengaruh langsung terhadap ekosistem perlu

didorong menuju alternatif yang lebih berkelanjutan dan realistis melalui peran aktif sektor publik, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Alternatif Implementasi Sektor Publik

Sumber: Lu et al (2015), dalam Anwar, (2022)

Di Indonesia, *RUEN (Rencana Umum Energi Nasional)* telah mengarah pada pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan biofuel. Namun, tantangan utama masih terletak pada pendanaan proyek hijau dan kurangnya regulasi yang tegas dalam mengurangi emisi karbon dari industri besar (Kusumaningrum & Yuhan, 2019)

Lebih lanjut, penerapan ekonomi hijau juga telah terbukti meningkatkan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta menciptakan peluang kerja baru yang lebih ramah lingkungan (Hasid et al., 2022). Hal ini sejalan dengan upaya global untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2050, di mana Indonesia juga telah menargetkan pengurangan emisi secara signifikan melalui berbagai kebijakan lingkungan dan energi terbarukan.

Agar ekonomi hijau dapat diterapkan secara optimal, diperlukan investasi tahunan sekitar 2% dari PDB global. Investasi ini berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan keberlanjutan (Kusumaningrum & Yuhan, 2019). Negara perlu mendorong insentif fiskal dan kebijakan ekonomi yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Selain itu, perlu ada reformasi politik untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi hijau, yang akan mendorong kompetisi jangka Panjang.

Transformasi menuju ekonomi hijau akan menciptakan efisiensi ekologi, menyediakan pekerjaan hijau, mengurangi kemiskinan, dan mencapai pertumbuhan inklusif. Kebijakan ini mencakup pekerjaan ramah lingkungan, akses terhadap layanan ekologi, subsidi sektor tertentu, serta kebijakan pengadaan publik. Investasi juga diperlukan untuk memperkuat

regulasi, memperkenalkan pajak berbasis pasar, serta meningkatkan pelatihan dan kapasitas (Lu et al., 2015).

Solusi Multilateral

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak ekonomi yang luas, memperburuk ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, dengan lebih dari setengah negara berkembang yang sebelumnya bergerak menuju standar pendapatan yang lebih tinggi kini semakin tertinggal. Ketidaksetaraan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global jangka panjang, memperburuk migrasi ekonomi, dan meningkatkan ketegangan sosial. Selain itu, perubahan iklim yang semakin cepat dapat memperburuk keadaan.

IMF menyoroti tiga prioritas utama untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertama, percepatan distribusi vaksin yang merata di seluruh dunia. Langkah ini dipandang sebagai investasi ekonomi paling berpengaruh, dengan potensi menambah hampir \$9 triliun pada PDB global hingga tahun 2025. Koordinasi internasional dalam penyediaan dan distribusi vaksin sangatlah krusial.

Kedua, reformasi sistem perpajakan internasional untuk mengatasi persaingan pajak yang tidak sehat dan mengurangi kebijakan sepihak yang merugikan. OECD telah memulai kerangka kerja yang melibatkan 139 negara guna menciptakan sistem pajak yang lebih sederhana, adil, dan terkoordinasi. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memiliki kepastian dalam membayar pajak di negara tempat mereka beroperasi.

Ketiga, penanganan perubahan iklim yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keuangan global. Transisi menuju ekonomi hijau perlu difasilitasi melalui kebijakan yang mendorong investasi berkelanjutan, seperti peningkatan harga karbon yang dapat menjadi sinyal pasar penting. Langkah ini diperkirakan dapat meningkatkan PDB global sebesar 0,7% per tahun selama 15 tahun ke depan serta menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Negara-negara disarankan untuk menetapkan harga karbon yang lebih tinggi, baik melalui pajak karbon maupun sistem perdagangan emisi yang disesuaikan dengan kebijakan domestik.

Namun, negara-negara berpenghasilan rendah berisiko tertinggal dalam transisi ini. Mereka diperkirakan membutuhkan dukungan finansial sebesar \$450 miliar dalam lima tahun ke depan untuk pulih dari pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bantuan dari negara-negara maju sangat diperlukan, terutama dalam mengatasi beban utang dan menciptakan ruang kebijakan bagi negara berkembang. Dalam hal ini, sektor keuangan swasta juga berperan penting dalam restrukturisasi utang guna mencegah krisis utang berkepanjangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Perubahan iklim adalah tantangan global yang hanya dapat diatasi melalui kerja sama internasional. Meskipun sistem multilateral telah mengalami kemajuan dalam upaya kolektif, langkah-langkah yang diambil masih belum cukup untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin parah. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara harus terus diperkuat, terutama melalui perjanjian seperti UNFCCC dan COP26, yang bertujuan menghasilkan langkah konkret, seperti penghentian penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil.

Namun, ketegangan geopolitik, termasuk konflik seperti perang Rusia-Ukraina, memperburuk hubungan antarnegara, menghambat kerja sama global, dan melemahkan solidaritas dalam menangani krisis iklim. Oleh sebab itu, meskipun multilateralisme memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau, diperlukan komitmen yang kuat, transparansi, serta tujuan yang jelas dan dapat diterapkan di tingkat nasional. Dengan pendekatan ini, dunia dapat bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan stabil dalam jangka panjang.

Selain itu, dalam perjanjian internasional, tanggung jawab harus dibagi secara adil. Negara maju perlu mengubah pola produksi dan konsumsi mereka agar lebih berkelanjutan, sementara negara berkembang memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan keberlanjutan jika didukung dengan kebijakan yang tepat. Di sisi lain, negara industri memiliki peran penting dalam memberikan dukungan finansial dan teknologi bagi negara berkembang guna mempercepat transisi menuju ekonomi ramah lingkungan (Aidt, 2010).

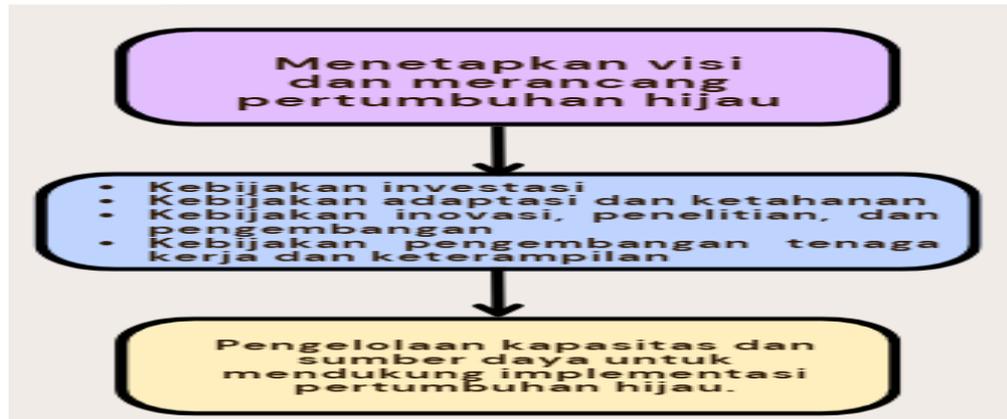
Proyeksi Implikasi Kebijakan

Dalam jangka panjang, kebijakan pertumbuhan hijau dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mengelola sumber daya secara lebih efisien, mendorong aktivitas ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat, serta mengembangkan inovasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Kebijakan ini mencakup pengurangan emisi polusi udara, pembatasan penggunaan energi dan karbon, serta pengelolaan sumber daya air dan perluasan wilayah konservasi. Beberapa negara telah berhasil memisahkan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan emisi CO₂, meskipun pemisahan secara mutlak masih jarang terjadi dibandingkan dengan pemisahan relatif.

Agar pertumbuhan hijau dapat berjalan optimal, pemerintah perlu mengintegrasikannya ke dalam kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan isu lingkungan seperti keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya air. Meskipun kesadaran akan pentingnya menggabungkan aspek lingkungan dalam

pembangunan terus meningkat, banyak negara masih belum memiliki strategi pertumbuhan hijau yang komprehensif, terutama dalam sektor pertanian.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan serta koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah. Tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan pertumbuhan hijau sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dilaksanakan secara kolaboratif dan diawasi secara berkala untuk memastikan dampak positif serta keberlanjutannya.

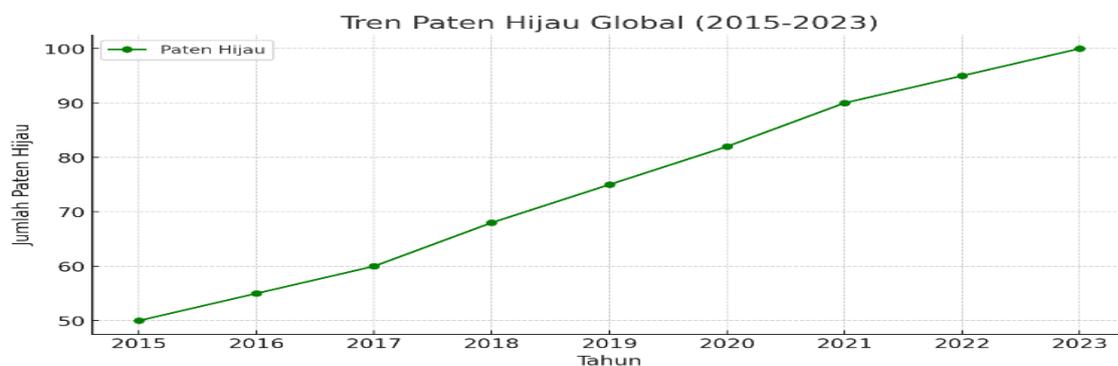


Gambar 2. Kerangka kebijakan pertumbuhan hijau negara berkembang

Sumber: diolah

Evaluasi kebijakan yang ketat harus diperkuat untuk memastikan bahwa dukungan dialokasikan secara efisien dan sumber daya digunakan dengan cara yang paling hemat biaya. Ini memerlukan data yang akurat serta pengembangan hubungan yang relevan antara indikator kebijakan dan hasil yang dicapai.

Inovasi hijau, yang diukur melalui jumlah paten, telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (lihat Gambar 3). Pasar negara berkembang juga menunjukkan kontribusi yang lebih besar terhadap paten hijau, meskipun mereka seringkali harus beradaptasi dengan inovasi dalam produksi internasional.



Gambar 3. Green Patents

Sumber: OECD, diolah

Green Patents memainkan peran penting dalam mendorong inovasi ramah lingkungan. Inovasi biasanya lebih berhasil dalam sektor yang berkembang pesat, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung penyebaran teknologi hijau, memperkuat pasar, dan mendorong perubahan perilaku konsumen. Berbagai instrumen kebijakan yang efektif mencakup regulasi terhadap zat berbahaya, standar kinerja, label ramah lingkungan, sertifikasi, serta standar teknologi.

Selain itu, dukungan melalui pengadaan publik dan subsidi bagi konsumen dapat membantu meningkatkan daya saing produk ramah lingkungan di pasar. Agar efektif, kebijakan ini harus dirancang secara cermat untuk menghindari distorsi pasar, dengan mengadopsi kombinasi strategi dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi dan selaras.

5. KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan ini, banyak negara mulai menerapkan strategi ekonomi hijau guna menciptakan pemulihan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Ekonomi hijau merupakan strategi efektif dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasinya dapat mengurangi ketimpangan sosial dan dampak lingkungan jika didukung oleh regulasi yang kuat, investasi yang memadai, serta kerja sama multilateral yang efektif. Pemerintah Indonesia dapat mempercepat transisi dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk energi terbarukan dan industri hijau. Selain itu, kebijakan pajak karbon dan insentif bagi industri yang menerapkan praktik ramah lingkungan perlu diperkuat untuk mendorong perubahan sistematis. Dalam skala global, Indonesia harus berperan lebih aktif dalam forum internasional seperti G20 dan UNFCCC guna memastikan adanya pendanaan yang berkelanjutan dan transfer teknologi hijau yang lebih merata.

DAFTAR REFERENSI

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan desentralisasi di Indonesia. *KINERJA*, 20(1), 53–68. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i1.697>
- Aidt, T. S. (2010). Green taxes: Refunding rules and lobbying. *Journal of Environmental Economics and Management*, 60(1), 31–43. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2010.04.001>
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>
- Clemente-Suárez, V. J., Navarro-Jiménez, E., Moreno-Luna, L., Saavedra-Serrano, M. C., Jimenez, M., Simón, J. A., & Tornero-Aguilera, J. F. (2021). The impact of the COVID-

- 19 pandemic on social, health, and economy. *Sustainability*, 13(11), 6314. <https://doi.org/10.3390/su13116314>
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>
- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan kebijakan pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>
- Hasid, Z., Noor, A., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan indeks komposit pertumbuhan inklusif dan faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150>
- Lu, J., Fan, W., & Meng, M. (2015). Empirical research on China's carbon productivity decomposition model based on multi-dimensional factors. *Energies*, 8(4), 3093–3117. <https://doi.org/10.3390/en8043093>
- Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a green economy*. Earthscan Publications Limited.
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 75–83. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- UN Environment Programme. (2024). *Green economy*. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>
- Van den Berg, H. (2016). *Economic growth and development* (3rd ed.). World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Windi Yuni Andini, Aisyah, A. R., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi prinsip ekonomi Islam dalam penerapan ekonomi hijau di Indonesia: Menuju pembangunan berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.